

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2014-2018)

Erna Chotidjah Suhatmi¹, Retna Dewi Lestari²

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta,
Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universtas Duta Bangsa Surakarta,
Jl. Pinang Raya 47 Cemani Grogol Sukoharjo 57154 telp. (0271) 719552
email: erna_chotidjah@udb.ac.id*

Abstrak

Aspek utama pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Unsur penunjang Pendapatan Asli Daerah salah duanya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. Tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 mencapai 433.485.481 ribu rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi Kabupaten Sukoharjo dikarenakan lokasi tersebut merupakan daerah penyangga selain Kabupaten Klaten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2014 hingga tahun 2018 yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial hanya variabel pajak daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci: Pajak, Retribusi, PAD, Sukoharjo

Abstract

The main aspect of regional financing in Sukoharjo Regency comes from the Regional Original Income (PAD). One of the supporting elements of Regional Original Income comes from local taxes and levies. It was noted that the Regional Original Revenue of Sukoharjo Regency in 2018 reached 433,485,481 thousand rupiah. This study aims to determine the effect of local taxes and levies on local revenue in Sukoharjo Regency. The location of Sukoharjo Regency was chosen because this location is a buffer area other than Klaten Regency. The data used in this research is time series data from 2014 to 2018 which is sourced from the Central Statistics Agency. The analytical method used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it is known that simultaneously the variables of local taxes and levies have an effect on local revenue. Partially, only local tax variables have an effect on local revenue in Sukoharjo Regency.
Keywords: Tax, Retribution, PAD, Sukoharjo

1. Pendahuluan

Iuran wajib yang dibayarkan oleh individu maupun lembaga/badan ditujukan pada daerah tanpa mempertimbangkan imbalan merupakan definisi dari pajak daerah (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah sifatnya bukan suatu yang memaksa namun berdasarkan kesadaran dan mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah diperuntukkan untuk membiayai infrastruktur/pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah juga dapat dipecah berdasarkan sumber seperti pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penerangan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan serta yang lainnya.

Menurut Siahaan (2010) pajak daerah merupakan iuran yang sifatnya wajib dilakukan oleh pribadi maupun badan tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Fungsi pajak daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pajak daerah memiliki enam karakteristik meliputi pungutan oleh pemerintah daerah dengan dasar peraturan undang-undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung, hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zuraida, 2014).

Retribusi daerah diatur dalam Undang-undang 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pembayaran jasa dan pemberian izin tertentu. Retribusi daerah dapat disediakan maupun diberikan pemerintah daerah bagi kepentingan beberapa pihak. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan asli daerah diatur pada UU nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan daerah yang didasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak dan retribusi daerah yang berlaku merupakan sumber penerimaan daerah dan dasarnya tidak hanya urusan pemerintah daerah saja namun pihak penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pihak masyarakat secara umum. Masyarakat yang notabene merupakan bagian dari daerah maupun badan/lembaga dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah wajib sifatnya untuk membayar pajak atau retribusi daerah (Pondaag dkk, 2016).

Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tiap tahunnya. Alat ukur ekonomi suatu wilayah merupakan indikator penting yang nantinya akan mengarahkan pada sektor mana yang harus dibangun atau diprioritaskan. Masing-masing sektor tentunya memiliki peran tersendiri dan skala tersendiri. Pertumbuhan PDRB secara riil adalah cerminan pertumbuhan pembangunan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi dan perencanaan program pembangunan daerah baik yang akan maupun sudah dilakukan. Hasil penghitungan ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah yang sesungguhnya (Nurhayati, 2016).

Kegiatan yang dilangsungkan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan arti dari pembangunan nasional. Realisasi tujuan tersebut juga harus memperhitungkan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha mewujudkan kemandirian bangsa dengan memperhatikan pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang bisa diakses dan berasal dari masyarakat yaitu dari pajak (Waluyo, 2011). Pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah dimana pajak pusat dapat diartikan sebagai pajak dengan pengelola langsung dari pemerintah pusat sedangkan pajak daerah pengelolaannya berasal dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jika membahas pajak pusat seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), Bea Materai dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Pajak daerah dapat dibagi kedalam beberapa bagian yang berasal dari pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan lainnya Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan lainnya (Mazwanaty dkk, 2015).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten Penyangga selain Kabupaten Klaten. Kabupaten Sukoharjo memiliki strategi yang sudah berjalan dalam meningkatkan pendapat asli daerah namun memang belum menunjukkan keberhasilan dan pencapaian target. Terdapat enam strategi untuk meningkatkan PAD salah satunya peningkatan hasil pemungutan retribusi pasar (Moenek dan Santoso, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan merupakan data *time series*. Data yang digunakan merupakan data pajak daerah, data retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. Sebelum dilakukan uji analisis maka data terlebih dahulu harus melewati uji normalitas dan uji asumsi klasik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dapat dihiung secara matematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

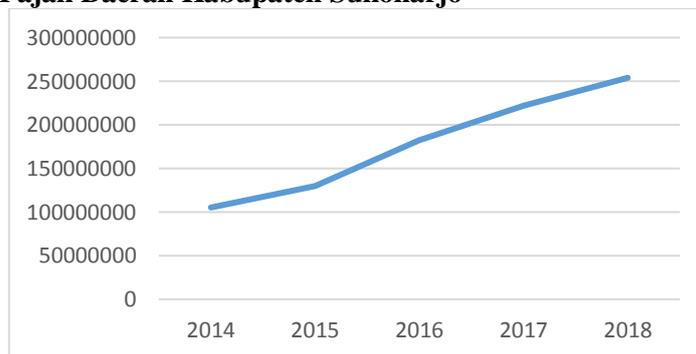
b1 = Koefisien Pajak Daerah

b2 = Koefisien Retribusi Daerah

e = Kesalahan/eror

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

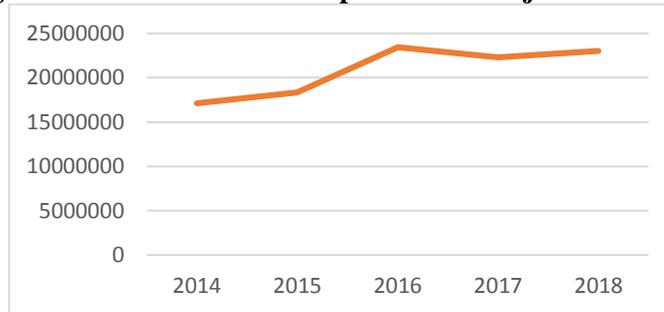


Gambar 1. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

Sumber: BPS diolah (2019)

Berdasarkan gambar 1 mengenai perkembangan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dengan peningkatan berkisar 21-23%. Adanya peningkatan pajak daerah dari tahun ke tahun akan membuat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo juga akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu pemasukan bagi daerah. Setiap daerah diharapkan dari tahun ketahun memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dari waktu ke waktu. Pajak daerah ini bisa berasal dari pajak restaurant, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak lainnya.

3.2. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo

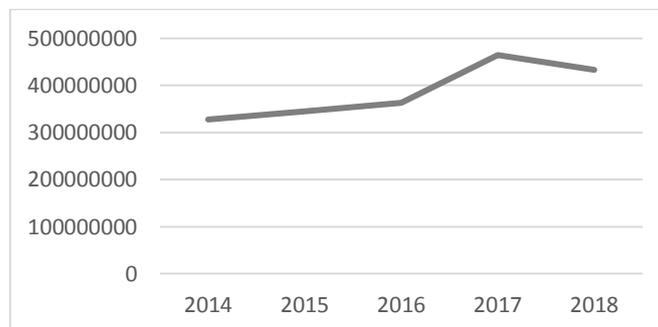


Gambar 2. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

Sumber: BPS diolah (2019)

Berdasarkan gambar 2 mengenai perkembangan retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan retribusi daerah dikarenakan kepatuhan warga dimungkinkan turun pada tahun-tahun yang mengalami penurunan. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017 retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan sebesar 4%. Pada tahun 2018 retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan sebesar 3%. Sebaiknya pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan retribusi daerah misalnya saja peningkatan retribusi daerah yang berasal dari retribusi parkir maupun retribusi pasar.

3.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo



Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018

Sumber: BPS diolah (2019)

Berdasarkan gambar 3 mengenai perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pendapatan asli daerah dapat bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dana lokasi umum, dan lainnya.

3.4. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Sebelum data akan dilakukan regresi maka sebaiknya data melewati uji normalitas dan uji asumsi klasik. Data yang sudah melalui uji tersebut dan dinyatakan lolos kemudian dapat diuji lanjut regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dan uji asumsi klasik.

Sumber : Analisis Data Sekunder, 2020

Normalitas		
Jarque Bera		0,438
<i>Probability</i> Jarque Bera		0,802
Heterokedastisitas		
Obs.R ²		3,439
<i>Probability</i> Chi-square		0,873
Multikolinearitas		
No	Faktor Produksi	VIF
1	Pajak Daerah (X ₁)	2,197
3	Retribusi Daerah (X ₃)	2,444
Autokorelasi		
Durbin Watson		2,117
Du		1,201
DL		1,410

Berdasarkan tabel 1 mengenai uji normalitas dan uji asumsi klasik dapat dilihat pada uji normalitas nilai jarque bera sebesar 0,802 artinya nilai tersebut lebih besar dari alpha 5% dan dikatakan data berdistribusi normal. Uji heterokedastisitas menunjukkan nilai *Probability* Chi-square sebesar 0,837. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan alpa 0,05 sehingga data lolos dari uji heterokedastisitas. Uji multikolinearitas perlu dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Indikator uji dari multikolinearitas berdasarkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai VIF variabel X1 sebesar 2,197 sementara VIF variabel X2 sebesar 2,444. Nilai tersebut berada di bawah nilai standar 10 sehingga data lolos dari uji multikolinearitas.

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Berdasarkan tabel 1 di atas nilai Durbin Watson sebesar 2.117, pembanding menggunakan nilai signifikansi 5%, maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai du sebesar 1,201. Karena nilai DW 2,117 lebih besar dari batas atas (du) 1,201 dan kurang dari 4 – 1,201 (2.799), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini telah lolos dalam uji normalitas dan uji asumsi klasik sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimate)

3.5.Regresi Linear Berganda

Data yang telah lolos uji asumsi klasi dan uji normlaitas data kemudian dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan ketika variabel dependen berjumlah satu variabel sedangkan jumlah variabel independennya minimal dua. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah sementara itu variabel independen yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai variasi atau kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai adjusted R² sebagai indikator dalam melihat kemampuan penjelasan variabel independen terhadap variabel dependennya. Informasi mengenai baik dan tidaknya model regresi yang akan diestimasi juga dapat dilihat dari nilai adjusted R². Angka yang diukur dari nilai tersebut memperlihatkan seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai adjusted R² memiliki range nilai dimulai dari angka 0 hingga 1. Uji simultan sering dikaitkan dengan uji-F dimana uji ini untuk melihat apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji parsial atau dikenal dengan uji-t merupakan suatu uji statistika untuk melihat apakah tiap variabel indepeden secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji-t melihat dari indikator nilai signifikansi masing masing variabel independen yang terbagi ke dalam tiga tingkat kepercayaan yaitu 99%, 95% dan 90%. Apabila nilai signifikansi variabel independen kurang dari nilai α maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

No.	Faktor Produksi	<i>Expected Sign</i>	Koefisien Regresi	<i>Std.Error</i>	<i>Probability t</i>
1	Konstanta	+/-	1,2197	0,470	0,122
2	Pajak Daerah (X ₁)	+	2,893**	0,651	0,047
3	Retribusi Daerah (X ₃)	+	1,4112	0,491	0,102
R ²			0,9652		
<i>Adjusted R²</i>			0,9305		
<i>S.E.of regression</i>			0,0967		
F _{hit}			2,7795**		
<i>Probability F</i>			0,0347		

Sumber : Analisis Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabel 2 mengenai hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dibahas ke dalam tiga aspek yaitu uji determinasi, uji F dan uji-t. Berdasarkan uji determinasi dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,9305 sehingga dapat diartikan bahwa 93,05% variasi dari variabel dependen (pendapatan asli daerah) dapat dijeaskan oleh variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan sisanya sebanyak 6,95% dijelaskan variabel lain di luar model. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 2 menunjukkan nilai Probability F sebesar 0,0347 dan nilai tersebut kurang dari nilai alpha 0,05. Artinya nilai tersebut signifikan sehingga variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo.

Uji-t berfungsi untuk melihat apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 2 nilai Probability t variabel pajak daerah bernilai 0,047 sehingga nilai tersebut kurang dari alpha 5%. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 2,893 dan bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pajak daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 2,893 satuan. Hasil tersebut juga senada dengan beberapa penelitian seperti Kusuma (2013) dan Fitriana (2014) yang juga menyatakan bahwa pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah dan sifatnya signifikan. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus mempunyai strategi yang tepat dalam menaikkan nilai pajak daerah namun tetap pada ketentuan sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan tabel 2 kita juga dapat mengetahui bahwa variabel retribusi daerah tidak signifikan dilihat dari nilai Probability t sebesar 0,102 atau lebih besar dari alpha 5%. Jika dilihat dari nilai retribusi daerah sifatnya fluktuatif. Perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya (Lakoy, 2016).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Secara parsial hanya variabel pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo sementara variabel retribusi daerah tidak berpengaruh. Sebaiknya pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan cara menghimbau langsung masyarakat daerah untuk taat membayar pajak sementara itu strategi pemerintah daerah juga harus disiapkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pajak daerah dengan cara pengawasan, pembinaan dan evaluasi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2019). Pajak Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. BPS : Kabupaten Sukoharjo
- Fitriana. (2014). Pengaruh pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Kusuma, Md. Krisna dan Ni Gst. Putu Wirawati. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi.

- Lakoy, Toar Waraney., dkk. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.01
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mazwanaty, ES. Ilat, V. Elim. I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*. 3 (5). 906-915
- Moenek, R. Santoso, EB. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Pasar Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. 45 (2). 140-154
- Nurhayati. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Perkapita Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 5 (1). 21-28.
- Pondaag, JK. Areros, WA. Kaparang, SG. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 1 (1). 1-9
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. JayaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta
- Zuraida Ida. (2014). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta*

